



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"

Jln. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110, Telp./Fax : 021-3842723, www.kominfo.go.id


NOTA - DINAS

Nomor : 2733 /DJPP1.1/PW.01.03/09/2017

Kepada Yth : Inspektur IV – Inspektorat Jenderal
Dari : Sekretaris Ditjen PPI
Perihal : Penyampaian Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 7 September 2017

Menindaklanjuti Nota Dinas Saudara Nomor : 105/PW.01.06/07/2017 tanggal 6 Juli 2017 perihal Pelaksanaan Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan, bersama kami sampaikan laporan pelaksanaan dimaksud di lingkungan Ditjen PPI.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.


R. Susanto

Tembusan Yth.

- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (sebagai laporan);

**IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
 DI LINGKUNGAN DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA**

NO	URAIAN BENTURAN KEPENTINGAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG TERKAIT	PENYEBAB	PROSEDUR PENANGANAN/PENCEGAHAN
LAYANAN PERIZINAN POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN				
1	Informasi terkait perizinan pos, telekomunikasi dan penyiaran, penahanan berkas perizinan serta pengaduan layanan perizinan yang belum tersedia serta pemberian izin yang diskriminatif.	Pimpinan dan pejabat terkait	- Pemohon izin tidak bisa mengecek posisi berkas perizinan dan tidak adanya layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Aplikasi Perizinan Online termasuk tanda tangan digital bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran. b. Pembangunan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kemkominfo. c. Penyediaan Layanan Call Center-159 d. Penerapan Sertifikasi ISO untuk pelayanan perizinan bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran. e. Pemutakhiran SOP perizinan. f. Memberikan kesejahteraan lebih kepada petugas perizinan.
2	Adanya kemungkinan menurunkan atau menaikkan perhitungan BHP Tel dalam pelaksanaan verifikasi BHP Tel terutama perusahaan non-Tbk untuk kepentingan perorangan.	Pimpinan dan pejabat terkait	- Pelaksanaan verifikasi masih tatap muka	Pembuatan aplikasi perhitungan besaran BHP Tel secara online dengan dukungan data-data keuangan /pendapatan perusahaan yang telah diaudit
3	Penertiban penyelenggara pos, telekomunikasi dan penyiaran yang berpotensi menimbulkan gratifikasi bagi petugas lapangan.	Pimpinan dan pejabat terkait	- Adanya tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari tatap muka dengan membangun aplikasi dan dengan menggunakan peralatan penertiban berbasis IT. b. Meningkatkan kesejahteraan petugas lapangan.